

MEROSOTNYA PEROLEHAN KURSI PARTAI ACEH KOTA BANDA ACEH PADA PEMILU 2014 DAN 2019

Nofriadi ¹⁾, Afrijal ²⁾, Hauria ³⁾, Mauliza ⁴⁾

^{1,2,,4} Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

E-mail Koresponden: nofriadi_fisip@usk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis merosotnya perolehan kursi partai Aceh kota Banda Aceh pada pemilu 2014 dan 2019. Partai Aceh merupakan salah satu dari beberapa partai lokal di Aceh yang diketuai oleh Muzakir Manaf yang menjadi tempat bernaung dan kendaraan politik bagi mantan kombatan GAM, partai ini menjadi sarana perjuangan tanpa senjata melainkan melalui politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor penyebab merosotnya perolehan kursi partai Aceh di kota Banda Aceh pada pemilu 2014 dan 2019. Metodologi yang digunakan dalam sebuah analisis ini, yaitu pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang bersifat komprehensif proses pengumpulan data yang menghasilkan informasi deskriptif berdasarkan hasil membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan factor penyebab merosotnya perolehan kursi partai Aceh di kota Banda Aceh pada pemilu 2014 dan 2019 yaitu :1). Rendahnya Elektabilitas Calon Legislatif dari Partai Aceh, 2) Lemahnya Manajemen Partai dan Sikap Kader Partai Aceh, 3) Kekecewaan Masyarakat Aceh Terhadap Partai Aceh.

Kata kunci: Partai Aceh; Pemilu; Politik.

Abstract

This research aims to find out and analyze the decline in the number of seats obtained by the Aceh party in the city of Banda Aceh in the 2014 and 2019 elections. The Aceh Party is one of several local parties in Aceh, chaired by Muzakir Manaf, which is a shelter and political vehicle for former GAM combatants. This party is a means of struggle without weapons but through politics. This research aims to determine the factors causing the decline in the number of seats for the Aceh party in the city of Banda Aceh in the 2014 and 2019 elections. The methodology used in this analysis is a qualitative and descriptive approach to obtain a comprehensive picture of the data collection process which produces descriptive information based on the results. read and examine various sources related to the research topic. The results of this research show the factors causing the decline in the number of seats for the Aceh party in the city of Banda Aceh in the 2014 and 2019 elections, namely: 1). Low Electability of Legislative Candidates from the Aceh Party, 2) Weak Party Management and Attitude of Aceh Party Cadres, 3) Disappointment of the Aceh People towards the Aceh Party. Keywords: aceh party, elections, politics.

Key words: Aceh Party; Elections; Politics.

Article History:

Received : 2024-05-14

Revised : 2024-06-26

Accepted : 2024-06-30

PENDAHULUAN

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI telah berkonflik selama 32 tahun, konflik berhasil didamaikan dengan Memorandum of Understanding (MoU) di tandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 antara pemerintah Indonesia dengan GAM, tempatnya berada di Helsinki Finlandia. Kesepakatan ini menjadi harapan besar untuk hidup yang lebih baik, aman, dan damai untuk seluruh masyarakat Aceh (Karya, 2018:45).

Dalam politik, telah tercantum di dalam MOU bahwa Aceh diberikan wewenang untuk membentuk partai lokal. Karena salah satu yang mendorong keberhasilan kesepakatan perdamaian Mou Helsinki ialah Aceh dapat mendirikan partai lokalnya sendiri atas persetujuan pemerintah Indonesia. Sehingga Aceh menjadi provinsi pertama yang diberikan izin mendirikan partai lokal di Indonesia (Hafijal, 2020:2-3).

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang partai politik local peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, bahwa partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh

sekelompok warga Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan Wakil Walikota.

Partai lokal juga merupakan salah satu hasil dari kompromi politik antara GAM pemerintah RI untuk menciptakan perdamaian di provinsi Aceh, dengan adanya persetujuan ini dapat meninggalkan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka dibawah payung NKRI (Fattaqun, 2017:8-9). Tujuan pembentukan partai lokal salah satunya ialah dapat menjadi alat perjuangan tanpa peperangan sehingga dapat merawat spirit perdamaian dan menumbuhkan semangat demokrasi di Aceh.

Partai Aceh merupakan salah satu dari beberapa partai lokal di Aceh yang diketuai oleh Muzakir Manaf yang menjadi tempat bernaung dan kendaraan politik bagi mantan kombatan GAM, partai ini menjadi sarana perjuangan tanpa senjata melainkan melalui politik. Diantara partai lokal yang lain, partai Aceh salah satu partai yang mendominasi dalam perpolitikan Aceh (Hafijal, 2020:3).

Partai Aceh menjadi peserta pemilu legislatif DPRA pertama kali pada tahun 2009, mereka mampu meraih sekitar 46.91% atau dengan kata lain mereka memperoleh 33 dari 69 kursi dewan di DPRA. Saat itu suara yang diperoleh sebanyak 1.007.173 dengan total sah 2.146.141. Partai Aceh juga kembali menjadi peserta pemilu tahun 2014. Karena telah ada wakilnya di DPRA PA tidak perlu melakukan verifikasi faktual. Suara yang diperoleh pada pemilihan legislatif menurun sehingga kehilangan empat kursi dewan. PA mendapatkan 29 kursi dari total 81 kursi dewan DPRA, yang mana saat itu suara yang diperoleh PA mencapai 35.34% (Abdullah, 2020).

Pada pemilu legislatif 2019 PA terus mengalami kemerosotan suara, yang mana hanya memperoleh 15.62% dengan 18 kursi dewan dari 81 jumlah kursi yang tersedia, menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Merosotnya Perolehan Kursi Partai Aceh Di Kota Banda Aceh Pada Pemilu 2014 Dan 2019."

LITERATURE REVIEW

Partai Politik

Secara etimologis, kata "partai" berasal dari bahasa Latin "pars" yang berarti "bagian". Pengertian ini mengandung makna bahwa di suatu negara seharusnya tidak hanya ada satu partai saja, karena jika hanya ada satu, maka itu bukan merupakan "bagian", melainkan keseluruhan. Dengan demikian, keberadaan lebih dari satu partai adalah suatu keniscayaan (Rabbani, 2018: 38).

Sementara itu menurut Miriam Budiardjo (2012), partai politik adalah sekumpulan orang yang terorganisir dengan orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah meraih kekuasaan politik dan kedudukan politik melalui cara-cara konstitusional untuk melaksanakan program-programnya (Satriawan dan Lutfi, 2015: 22).

Menurut Frank J. Sorauf (1972) dalam (Anom, 2022) konsep partai politik dapat dilihat dari:

1. Partai politik mengembangkan organisasinya dan berupaya mencapai tujuan-tujuannya melalui jalur pemilihan umum.
2. Partai politik bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok serta lapisan masyarakat secara luas (ekstensif).
3. Fokus utama partai politik adalah pada panggung atau arena politik dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuannya.
4. Partai politik menunjukkan stabilitas dan kesinambungan organisasi, serta bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh dalam proses pengambilan keputusan dengan memperoleh loyalitas dari anggota-anggotanya.

Strategi Politik

Strategi politik terdiri dari 2 kata, yaitu "Strategi" dan "politik", Strategi politik merupakan ilmu yang mempelajari teknik, taktik, cara, dan kiat yang digunakan oleh para politisi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Strategi ini juga digunakan untuk

merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan politik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Pena, 2006: 448).

Strategi politik bertujuan untuk mewujudkan cita-cita politik tertentu. Sebagai contoh, strategi politik dapat berupa pemberlakuan peraturan baru, pembentukan struktur baru dalam administrasi pemerintahan, atau pelaksanaan program deregulasi, privatisasi, atau desentralisasi (Twoendro, 2018: 36). Kemudian, menurut Newman dan Sheth dalam (Sahea, dkk, 2018), ada beberapa strategi yang harus dilakukan, yakni:

1. Strategi penguatan, dilakukan oleh kandidat terpilih dengan membuktikan janji-janji politiknya seperti kebijakan pro-publik, anggaran berkeadilan, dll untuk menguatkan citra.
2. Strategi rasionalisasi, diambil ketika kinerja kandidat/partai tidak sesuai citra yang dibangun agar tidak merusak citra di mata pemilih.
3. Strategi bujukan, diterapkan jika citra kandidat tidak sesuai persepsi pemilih meski kinerjanya baik.
4. Strategi konfrontasi, diterapkan jika kandidat salah membangun citra tidak sesuai kinerjanya, sehingga harus merombak citra dan kinerja agar dipilih pemilih yang semakin cerdas dan kritis.

Dengan demikian, strategi politik adalah strategi yang digunakan oleh para politisi untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, baik dalam rangka memperoleh kekuasaan maupun dalam rangka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tertentu yang sesuai dengan visi dan misi politiknya.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam sebuah analisis ini, yaitu pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang bersifat komprehensif proses pengumpulan data yang menghasilkan informasi deskriptif berdasarkan hasil membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.

Komariah (2009) dalam Oktafia (2014) mengemukakan bahwa Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang secara tepat menggambarkan suatu peristiwa, kondisi atau situasi sosial yang digambarkan dengan kata-kata. Penelitian kualitatif semacam itu juga dapat dirancang untuk berfungsi sebagai dasar atau sumber teori praktis, kebijakan, urusan sosial, dan tindakan. Penelitian kualitatif dapat digali, dikembangkan dan diperdalam dengan melihat secara detail suatu fenomena yang terjadi dalam suatu lingkungan sosial dimana unsur-unsur lingkungan itu saling berhubungan dan berkaitan.

Maka data yang diperlukan yang berkaitan dengan merosotnya perolehan kursi partai Aceh di kota Banda Aceh pada pemilu 2014 dan 2019, data diperoleh dari berbagai sumber dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi. Observasi adalah Tindakan pengamatan dan pencatatan fenomena dengan cara terstruktur dan sistematis (Hartono, 2018: 32).
2. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan data pelengkap atau penunjang dari penelitian ini disebut juga sebagai data sekunder. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang telah ada. Baik berupa tulisan, gambar dan sebagainya (Hartono, 2018: 32).
3. Wawancara. Teknik wawancara adalah satu Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian (Hartono, 2018: 32).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Partai Politik Lokal

Partai politik lokal adalah organisasi yang terdiri dari sejumlah warga negara yang memiliki kepentingan yang kurang lebih sama dan sepakat untuk memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan tersebut secara damai dalam kerangka negara-bangsa. Kepentingan-kepentingan ini dilindungi dan dilaksanakan melalui penguasaan posisi politik atau pemerintahan. Kepentingan tersebut juga dapat dilindungi dan diwujudkan melalui kontrol pemerintah melalui badan perwakilan rakyat (parlemen) atau melalui demonstrasi dan unjuk rasa (di luar parlemen). Aspirasi, termasuk aspirasi daerah, ada di negara dengan luas wilayah yang luas, yang memang sangat berguna bagi pengambil kebijakan nasional (Jafar, 2009: 30).

Pasal 1 ayat 14 UUPA mendefinisikan partai politik lokal sebagai organisasi politik yang didirikan secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berkedudukan di Aceh atas dasar kemauan dan keinginan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya, anggotanya, masyarakat, , negara. dan negara melalui pemilihan. anggota DPRK, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UUPA, partai politik lokal dalam sistem hukum Indonesia hanya ada di Provinsi Aceh. Di luar provinsi ini, tidak ada partai politik lokal. Setelah UUPA disahkan, banyak daerah di Indonesia yang meminta hak untuk membentuk partai politik lokal. Namun, sejauh ini hanya Provinsi Aceh yang memiliki partai politik lokal. Keberadaan partai lokal hanya untuk pemilihan anggota DPR Aceh dan DPR kabupaten/kota, dan Gubernur Aceh/Wakil Gubernur Aceh, serta Gubernur Aceh. wakil bupati dan walikota/wakil walikota (Ansari, 2017:223).

Sejarah Berdirinya Partai Aceh

Menyusul Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Salah satu isi nota kesepahaman yang memberikan keunikan Aceh yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia, berupa ruang bagi masyarakat Aceh untuk membentuk partai politik lokal sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi dan partisipasinya. Partai Aceh didirikan oleh para veteran Gam, intelektual dan banyak kelompok masyarakat lainnya di Aceh. Pada tanggal 4 Juni 2007, Partai Aceh didirikan di Banda Aceh dengan para pendiri Tgk.Yahya Mu'ad, Adnan Beurensyah, Tarmidi, Hasanuddin, Muhammad Yasir, mewakili para pendiri Partai Aceh (Suhelmi, 2022: 36)..

Partai Aceh sudah tiga kali berganti nama, saat didirikan bernama Partai GAM dan bendera yang digunakan sama dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), namun Indonesia menolak nama partai GAM karena dianggap melanggar tiga peraturan sekaligus, yakni Mou Helsinki, Pelanggaran Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan pelanggaran Undang-Undang Pembentukan Partai Daerah Untuk Memperhatikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Simbol GAM atau properti tidak dapat digunakan (Suhelmi, 2022:36).

Akhirnya pada tanggal 22 April 2008 pimpinan partai mengubah nama Partai Gerakan Aceh Merdeka menjadi Partai Aceh. Dan pada tanggal 22 Mei 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Aceh Tahun 2008 tentang Pengukuhan Pendaftaran Keberpihakan Aceh. Partai Aceh pertama kali dipimpin oleh Muzakkir Manaf sebagai Presiden, Sekretaris Muhammad Yahya, SH, dan Bendahara Hasanuddin (Suhelmi, 2022:36).

Penyebab Menurunnya Kursi Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif

Partai Aceh selalu mendominasi kekuasaan di legislative (parlemen). Eksistensinya lebih besar dari pada partai local lainnya. Dapat dilihat dari tiga perjalanan dalam pemilu legislatifve 2009, 2014 dan 2019 yang selalu mendominasi. Akan tetapi setiap pemilu PA terus mengalami kemerosotan jumlah kursi di DPRA pada pemilu 2014 dan 2019. Pada pemilu 2009, PA mendapatkan 33 dari 69 kursi DPRA di tingkat provinsi dan juga pada pileg 2009 mampu meraih 46.93 persen suara. Sayang sekali di tengah bertambahnya jumlah kursi di parlemen, pada pemilu 2014 PA kehilangan empat kursi dengan memegang 29 dari total 81 kursi di DPRA yang bertambah (Setya, 2019). Beberapa faktor yang menyebabkan merosotnya kursi Partai Aceh di Pilkada 2019 di Kota Banda Aceh

Rendahnya Elektabilitas Calon Legislatif dari Partai Aceh

Elektabilitas adalah kemampuan untuk dipilih dalam menduduki jabatan calon legislatif. Data tarik atau nilai jual yang dimiliki seseorang sehingga menarik orang untuk dipilih. Ditengah kondisi perpecahan elit Partai Aceh yang tak kunjung selesai dan mulai berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Aceh.

Jumlah suara PA merosot factor dari jumlah suara 847.956 pemilu 2014 menjadi 550.764 pemilu 2019. Oleh karena itu kursi PA di DPRA menurun sebanyak 11 kursi dibandingkan pada pemilu 2014. Factor penyebab merosotnya elektabilitas PA pada pileg DPRA 2019 yaitu; 1) Kekosongan factor di PA, sehingga pemilih mencari factor dari partai lain. 2) Kepercayaan factor terhadap PA semakin menurun. 3) Teknik marketing yang tidak maksimal serta lemah dalam meraih suara dan tidak menawarkan tawaran yang pasti pada factor (Abdullah, 2020).

Lemahnya Manajemen Partai dan Sikap Kader Partai Aceh

Lemahnya manajemen partai dan sikap kader partai di Aceh disebabkan oleh berbagai factor, seperti perbedaan pandangan, kurangnya komunikasi, dan kepentingan pribadi. Upaya perbaikan melibatkan pembinaan kader, peningkatan komunikasi internal, dan penegakan disiplin dalam partai.

Kekecewaan Masyarakat Aceh Terhadap Partai Aceh

Kekecewaan masyarakat menjadi salah satu alasan merosotnya jumlah kursi di DPRA pada pemilu 2014 dan 2019. Keberadaan parlok menjadi harapan bagi masyarakat aceh setelah mengalami berbagai macam situasi yang suli akibat konflik GAM dan Pemerintah RI. Dengan harapan aspirasi pemilih dapat dipenuhi oleh partai aceh. Di detiknews.com, menurut Effendi Hasan sebagai pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USK mengatakan "Saya pikir menurunnya (suara) Partai Aceh itu punya faktor. Pertama, bahwa masyarakat sudah bisa menilai ketika mereka pada 2014 mereka sudah memperoleh kursi yang dominan. Tapi kenyataannya masyarakat sangat kecewa dengan program-program yang tidak mengarah kepada rakyat,"

Penyebab lain menurut effendi ialah banyaknya kader yang henkang karena maju sebagai calon anggota DPR RI. Dan menurut Wakil Dekan 1 Fisip USK bahwa kader yang di pasang sekarang rata – rata kurang berpengaruh di kalangan masyarakat. Menurutny masyarakat terkadang tidak memilih dengan melihat partai tapi juga melihat pada figur (Detiknews.com).

KESIMPULAN DAN SARAN

Merosotnya perolehan kursi partai aceh di kota Banda Aceh pada pemilu 2014 dan 2019 terjadi karena beberapa factor, yaitu: Pertama, rendahnya elektabilitas calon legislatif dari Partai Aceh, hal ini disebabkan oleh 1) Kekosongan figur di PA, sehingga pemilih mencari figur dari partai lain. 2) Kepercayaan masyarakat terhadap PA semakin menurun. 3) Teknik marketing yang tidak maksimal serta lemah dalam meraih suara dan tidak menawarkan tawaran yang pasti pada masyarakat.

Kedua, lemahnya manajemen partai dan sikap kader partai di Aceh, hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan, kurangnya komunikasi, dan kepentingan pribadi. Upaya perbaikan melibatkan pembinaan kader, peningkatan komunikasi internal, dan penegakan disiplin dalam partai. Ketiga, kekecewaan masyarakat, hal ini juga menjadi salah satu faktor merosotnya jumlah kursi di DPRA pada pemilu 2014 dan 2019. Selain tiga hal tersebut, penurunan perolehan kursi Partai Aceh pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Banda Aceh juga disebabkan oleh persoalan internal partai dan persoalan eksternal yang berasal dari masyarakat serta tambah lagi dengan konflik antar elit partai yang belum diselesaikan dengan baik dan perubahan perilaku pemilih yang semakin rasional membuat caleg partai aceh tidak bisa memberikan garansi kepada pemilih.

Reference

- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47–54. <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i1.12847>
- Abdullah;. (2020, februari). Menurunnya Elektabilitas Partai Politik Lokal Di Aceh (Studi Analisis Partai Aceh Pada Pemilihan Legislatif DPRA 2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(1).
- Anom, B. (2022). Pengaruh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Terhadap Perilaku Pemilih Genasi Z Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewah Yogyakarta. *Skripsi. Fisip Universitas Muhammadiyah*.
- Ansari, M. I. (2017). Partai Politik Lokal dalam Tata Hukum Indonesia. *Tanjungpura Law Journal*, 1(2), 219-236.
- Dialeksi.com. (2022, September 11). Diantara Dominasi dan Meredupnya Partai Aceh. Retrieved Agustus 10, 2023, from Dialeksi: <https://www.dialeksi.com/analisis/di-antara-dominasi-dan-meredupnya-partai-aceh>.
- Hafijal, (2020). Analisis Penurunan Perolehan Kursi Partai Aceh Di Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Skripsi. Ilmu Sosial Dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.

- Jafar, M. (2009). *Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Karya, Abdi;. (2018). *Kemenangan Partai Aceh Pada Pemilihan Legislatif 2009 di Kabupaten Aceh Tamiang 2009*. Jurnal Ilmu Politik, 10 (2), 44-51.
- Oktafia, M. (2014). *Implementasi Lesson Study Pada Mata Pelajaran PKN Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran di Kelas: Studi Deskriptif di SMPN 26 Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). Skripsi.
- Sahea, R., Dkk. (2018). *Analisis Strategi Politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013*. Jurnal Jurusan Eksekutif, 1(1).
- Satriawan, M. I., & Lutfi, M. (2015). *Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik*. Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Lampung. Lampung.
- Setyadi, Agus;. (2019, Mei 16). *Perolehan Kursi Turun, Caleg Partai Aceh Dinilai Kurang Pengaruh*. Retrieved Agustus 10, 2023, from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-4551885/perolehan-kursi-turun- caleg-partai-aceh-dinilai-kurang- pengaruh>.
- Suhelmi, M. (2022). *Analisis Marketing Politik Partai Lokal Aceh (Studi Kekalahan Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif DPRK Simeulue Tahun 2019)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Twoendro, R. (2018). *Strategi Politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kuantu Singingi Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau